

LAMPIRAN

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan BPBD Tahun Anggaran 2016

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
 - c) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - d) Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran
 - e) Penyediaan Jasa Langganan
 - f) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
- 2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
- 3) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
Pengelolaan Kepegawaian
- 4) Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Laporan Bulanan dan Tahunan
 - Penyusunan LAKIP
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
- Rencana Kerja SKPD 2017
 - RKA/DPA – SKPD
 - Renstra BPBD 2016-2020
- c) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD
- 5) Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan :
- a) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
 - Pemantauan Daerah Berpotensi Bencana Alam
- b) Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara
- Pengadaan Kebutuhan Korban Bencana Saat Darurat
 - Laporan Fasilitasi Kebutuhan Korban Bencana akan Tempat Pengungsian Terpenuhi
- c) Kerjasama Penanggulangan Bencana
- Operasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana
 - Titik Rawan Aliran Sungai dan Kecamatan Rawan Longsor Terpantau
 - Dihasilkan SOP Penanganan Bencana
- d) Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
- Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana
 - Peningkatan Kapasitas Relawan
- e) Pengelolaan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana
- Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan
 - Pelatihan Kontributor Operator

- Akses Jalur Evakuasi Terhubung dengan Titik Kumpul
- Fasilitas Titik Kumpul Terpenuhi
- f) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Up Dating Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Bencana
 - Pengelolaan Media Jejaring Penanggulangan Bencana/SDIN
- g) Penanganan Pasca Bencana
 - Penanganan Prasarana yang Rusak agar Berfungsi Kembali
- h) Pengelolaan Sarpras Penanganan Pengungsi
 - Penataan Manajemen Logistik
 - Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum
 - Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsian
- i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehab Rekon Pasca Bencana
- j) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
 - Fasilitasi rehab rekon bidang sosek di wilayah pasca bencana
- k) Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana
 - Verifikasi kerusakan rumah akibat bencana
- l) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana
 - Pelatihan Pertukangan
- m) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Kajian Perencanaan Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Merapi 2010
- n) Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
 - Pembangunan Sarpras Mitigasi Fisik Pola Aliran Permukaan dan Penguatan Tebing

- Normalisasi Pola Aliran Sungai Krasak, Boyong, Gendol
 - o) Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
 - Fasilitasi Operasional Unit Ops Kecamatan
 - Desa Tangguh Bencana di 4 Desa
 - Sekolah Siaga Bencana di 4 Sekolah
 - p) Penyelenggaraan Rupidalops
 - Operasional Rupidalops
 - Pemeliharaan Sarpras Rupidalops
 - Penyediaan Sarpras Rupidalops :
 1. Penyediaan Media Informasi Bencana
 2. Penyediaan Software Antivirus
 - q) Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat
 - Peningkatan Kapasitas TRC
 - Pengelolaan Sarpras Kedaruratan
 - Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Operasional TRC
 - Operasional TRC
 - r) Stimulasi dan Sosialisasi Penggunaan Sarpras Pengurangan Resiko Bencana

Wajib Latih untuk Kelompok Masyarakat dan Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana
 - s) Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan
 - Operasional dan Pemeliharaan EWS
 - Operasional dan Pemeliharaan Bunker
- 6) Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan :
- a) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran.
 - c) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- f) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- g) Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- h) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

b. Capaian Kegiatan

- 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Terealisasinya pembayaran bendahara pengeluaran, pembuku, bendahara pengeluaran pembantu, pengelola gaji, pembantu pengelola gaji, pengurus barang, pembantu pengurus barang 12 bulan
 - b) Terealisasinya makanan dan minuman rapat, tamu 12 bulan
 - c) Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan
 - d) Terpenuhinya penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran:
 - Layanan surat menyurat 12 bulan
 - Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik 12 bulan
 - Penyediaan peralatan rumah tangga 3 jenis
 - e) Terealisasinya jasa langganan telepon, air, listrik dan surat kabar
 - f) Terselenggaranya jasa keamanan 12 bln/7 org; jasa kebersihan 12 bln/2 org; pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17 jenis.
- 2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Terpeliharanya gedung 2 (dua) unit
 - b) Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja :
 - Kendaraan roda 2 (dua) 24 unit

- Kendaraan roda 4 (empat) 17 unit
 - Terpenuhinya kebutuhan BBM 12 bulan
 - Perpanjangan kendaraan dinas 41 unit
 - c) Terpeliharanya meubeler 25 unit
- 3) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pengelolaan Kepegawaian
- Terlaksananya Penjagaan KGB 1 dok/12 bln
 - Terlaksananya Penjagaan Kenaikan Pangkat 1 dok/12 bln
 - Terlaksananya Penyusunan SKP 1 dok/12 bln
 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan Kepegawaian 12 dok/12 bln
 - Terlaksananya Penyusunan Daftar Nominatif 12 dok/12 bln
 - Terlaksananya Pelayanan KGB 100%/12 bln
 - Terlaksananya Pembinaan Pegawai 3 kali
- 4) Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Tersusunnya Laporan Bulanan 12 dok; Laporan Tahunan 1 dok
 - Tersusunnya LAKIP 1 dok; Perjanjian Kinerja 2 dok
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan; Triwulan 1 dok; Tahunan 1 dok
 - b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD:
 - Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2017 : 1 dok
 - Tersusunnya RKA/DPA-SKPD 1 kali; RKPA/DPPA 1 kali
 - Tersusunnya Renstra BPBD 2016-2020 : 1 dok
 - c) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD :
 - Pengendalian terhadap kebijakan Renja SKPD : 1 dok

- Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD : 1 dok
Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (per semester) : 2 dok
- Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (per triwulan) : 4 dok
- Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD : 1 dok

5) Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- a) Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :
 - Sosialisasi Daerah Rawan Bencana : 10 angkatan/600 orang
 - Pemantauan Daerah Berpotensi Bencana Alam : 19 lokasi
- b) Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara
 - Terlaksananya Pengadaan Kebutuhan Korban Bencana Saat Bencana : 1 paket terpadu
 - Terlaksananya Laporan Fasilitasi Kebutuhan Korban Bencana akan Tempat Pengungsian Terpenuhi : 1 dokumen
- c) Kerjasama Penanggulangan Bencana
 - Terlaksananya Operasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana 12 bulan
 - Titik Rawan Aliran Sungai dan Kecamatan Rawan Longsor Terpantau : 5 aliran, 1 kec
 - Dihasilkan SOP Penanganan Bencana : 1 dokumen
- d) Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
 - Terlaksananya Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana : 42 komunitas

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan : 3 angkatan
- e) Pengelolaan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana
 - Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan : 12 bulan
 - Akses Jalur Evakuasi terhubung dengan Titik Kumpul : 3 lokasi
 - Fasilitas Titik Kumpul Terpenuhi : 5 lokasi
- f) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Terlaksananya Up Dating Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Bencana : 12 bulan
 - Terlaksananya Pengelolaan Media Jejaring Penanggulangan Bencana (SDIN) : 12 bulan
- g) Penanganan Pasca Bencana
 - Terlaksananya Penanganan Prasarana yang Rusak agar Berfungsi Kembali : 17 kecamatan
- h) Pengelolaan Sarpras Penanganan Pengungsi
 - Terlaksananya Penataan Manajemen Logistik : 1 gudang logistik
 - Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum : 100 orang
 - Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsian : 100 orang
- i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehab Rekon Pasca Bencana : 6 kecamatan
 - Terlaksananya Penyaluran dan Monev Bantuan Presiden RI : 100%

- j) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
Terlaksananya Fasilitasi Rehab Rekon Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana : 1 kecamatan
- k) Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana
Terlaksananya Verifikasi Kerusakan Rumah Akibat Bencana : 17 kecamatan
- l) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana
Terlaksananya Pelatihan Pertukangan : 3 angkatan/30 orang
- m) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terlaksananya Kajian Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Kegiatan Rekonstruksi Pascabencana Merapi 2010 : 1 dokumen
- n) Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
- Terlaksananya Pembangunan Sarpras Mitigasi Fisik Pola Aliran Permukaan dan Penguatan Tebing : 3 lokasi
 - Terlaksananya Normalisasi Pola Aliran Sungai Krasak, Boyong, Gendol : 3 lokasi
- o) Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
- Terlaksananya Fasilitasi Operasional Unit Ops Kecamatan : 17 kecamatan
 - Terlaksananya Desa Tangguh Bencana di 4 Desa : 4 desa
 - Terlaksananya Sekolah Siaga Bencana di 4 Sekolah : 4 sekolah
 - Terlaksananya Lomba SSB dan Destana : 1 kali
- p) Penyelenggaraan Ropusdalops
- Terlaksananya Operasional Ropusdalops : 12 bulan
 - Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Ropusdalops : 12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Sarpras Rpusdalops :
 - a. Penyediaan Media Informasi Bencana : 1 unit
 - b. Penyediaan Software Antivirus : 5 unit
- q) Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat
 - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TRC : 2 angkatan
 - Terlaksananya Pengelolaan Sarpras Kedaruratan : 12 bulan
 - Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Operasional TRC : 4 paket
 - Terlaksananya Operasional TRC : 12 bulan
- r) Stimulasi dan Sosialisasi Penggunaan Sarpras Pengurangan Resiko Bencana
 - Terlaksananya Wajib Latih untuk Kelompok Masyarakat dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana: 60 orang/500 orang
 - Terlaksananya Partisipasi dalam Bulan PRB : 1 kali
- s) Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan
 - Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan EWS : 16 unit
 - Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Bunker : 2 unit
 - Terlaksananya Pembangunan EWS Awan Panas dan Lahar Hujan: 4 unit

6.) Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- a) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
 - Terlaksananya Pengawasan Pencegahan Kebakaran : 22 obyek
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran
 - Terlaksananya kesamaptaan petugas damkar dan evaluasi : 25 org/12 kali/1 dokumen

- c) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran : 12 kali (3 kali di Depok)/480 orang
 - Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Siswa/Wisata Edukatif : 22 kali
- d) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran :
- Seragam PDL lengkap dengan sepatu : 33 buah
 - Seragam PDH lengkap dengan sepatu : 33 buah
 - Inductor : 1 buah
 - Floating Pump : 1 buah
 - Tabung Pemadam Kebakaran : 100 buah
- e) Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran :
- Mobil Damkar : 4 buah
 - Mobil Tangga : 1 buah
 - Mobil Tanki Air : 2 buah
 - Tabung APAR : 31 buah
 - Pompa Diesel dan Genset : 3 buah
 - Tandon Air : 1 buah
 - Pesawat HT dan RIQ : 20 buah
 - Hydrant : 3 buah
 - SCBA (Self Contains Breathing Apparatus) : 3 buah
- f) Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran :
- Mobil Damkar : 4 buah
 - Mobil Tangga : 1 buah
 - Mobil Tanki Air : 2 buah
 - Pompa Diesel dan Genset : 3 buah
 - Tandon Air : 1 buah
 - Hydrant : 3 buah
 - SCBA (Self Contains Breathing Apparatus) : 3 buah

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|------|-------|---|---|---|---|----|
| Penanggulangan Korban Bencana | Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 80% | 2015 | 100 % | - | - | - | - | 1) |
|--------------------------------------|--|-----|------|-------|---|---|---|---|----|

Keterangan:

- 1). Data tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak ada nilai, karena di tahun tersebut tidak ada pernyataan Status Keadaan Darurat dari Bupati Sleman.

Data Capaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Profil SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bahaya Kebakaran di bawah ini.

Profil SPM

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Jenis Pelayanan Dasar: Penanggulangan Bahaya Kebakaran

| Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | Batas Waktu | TAHUN | Ke t |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|---------|
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|---------|

| | Indikator | Nilai | Pencapaian (Tahun) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|--|--|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| Penanggulan gan Bahaya kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota | 80% | 2015 | 18,04 % | 18,04 % | 18,04 % | 18,04 % | 18,04 % | 1) |
| | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) | 75% | 2015 | 93,33 % | 100% | 100% | 87,09 % | 84,62 % | 1) |
| | Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 85% | 2015 | 18,18 % | 24,24 % | 37,50 % | 62,50 % | 62,50 % | 2) |
| | Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) | 90% | 2015 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 2) |

Keterangan:

- 1). Indikator tetap sama seperti sebelum ada perubahan Permendagri; untuk capaian tahun 2012 cara perhitungan juga menggunakan Permendagri 69 Tahun 2012.

- 2). Indikator baru sesuai perubahan Permendagri; untuk capaian tahun 2012 cara perhitungan juga menggunakan Permendagri 69 Tahun 2012.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana
 - Pemetaan dan Pendataan Sarpras Penanggulangan Bencana
- 2) Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Kegiatan :
 - a) Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana

b. Capaian Kegiatan

- 1) Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana
 - Terlaksananya Pemetaan dan Pendataan Sarpras Penanggulangan Bencana : 17 kecamatan
- 2) Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Kegiatan :
 - a) Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana
 - Terlaksananya Koordinasi pada Daerah Rawan Bencana dan Penyusunan Dokumen Profil Huntap : 3 kecamatan dan 1 dokumen
 -

3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kegiatan : a) Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD

2) Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3) Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : Kajian Peraturan Perundang-Undangan

b. Capaian Kegiatan

1) Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kegiatan : Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD

- Tersusunnya Laporan Bulanan : 12 dokumen
- Tersusunnya Laporan Semesteran : 1 dokumen
- Tersusunnya Laporan Tahunan : 1 dokumen

2) Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Terlaksananya Audit Internal SOP : 1 dokumen
- Terlaksananya Implementasi SPIP di Lingkungan Badan : 12 bulan

3) Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : Kajian Peraturan Perundang-Undangan

- Tersusunnya Dokumen Revisi Perbup tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana : 1 dokumen

4. Urusan Kearsipan

a. Program dan Kegiatan

Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan : Pengelolaan Dokumen SKPD

b. Capaian Kegiatan

Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pengelolaan Dokumen SKPD

- Terlaksananya Pelayanan Arsip dan Perpustakaan : 12 bulan

5. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Gateway SMS

b. Capaian Kegiatann

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Gateway SMS (Terlaksananya Sistem
Gateway SMS Kebencanaan : 12 bulan/17 kecamatan)

| No. | Urutan data | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Satuan |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | Kesempatan | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | keg |
| 2. | Jumlah Masyarakat Terlatih bahaya Kebakajan | 760 | 840 | 880 | 1.280 | 2 | org |
| 3. | Jumlah gedung yang memiliki sistem proteksi kebakaran berfungsi baik | 58 | 83 | 108 | 158 | 180 | objek |
| 4. | Kejadian kebakaran | 81 | 64 | 90 | 140 | 88 | kali |
| 5. | Kesiapsiaaan kebakaran | 177 | 148 | 162 | 115 | 115 | Kali |
| 6. | Jumlah aparat pemadam kebakaran yang ikut diklat | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | Aparat |
| 7. | Cakupan pelayanan kebakaran | 18,4 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | % |
| 8. | Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK | 93 | 100 | 100 | 87 | 84,62 | % |
| 9. | Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi syarat kualifikasi | 18,18 | 24,24 | 37,50 | 53,13 | 62,50 | % |
| 10. | Jumlah mobil pendam kebakaran diatas 3000-5000 kiter pada WMK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | % |
| 11. | Kerugian kebakaran | 33.598.850.000,00 | 6.790.500.000,00 | 5.163.100.000,00 | 17.659.000.000,00 | 11.143.900.000,00 | Rp |

| No. | Urutan Data | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | satuan |
|-----|--|------|------|------|------|------|-----------|
| 1. | Jumlah daerah Rawan Bencan | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Desa |
| 2. | Jumlah gladi lapangan penanggulangan bencana | 7 | 8 | 13 | 16 | 29 | Gladi |
| 3. | Penanggulangan Bencana : | | | | | | |
| | - Erupsi | - | 1 | 1 | - | - | Kejadi an |
| | - Gempa Bumi | - | - | 2 | - | - | Kejadi an |
| | - Banjir | 1 | - | 3 | 6 | 7 | Kejadi an |
| | - Banjir Lahar Digin | 9 | 3 | 3 | - | 2 | Kejadi an |
| | - Tanah Longsor | 5 | 5 | 9 | 12 | 85 | Kejadi an |
| | - Angin Puting Beliung | 17 | 23 | 22 | 50 | 74 | Kejadi an |
| | - Petir | - | 2 | - | 5 | 9 | Kejadi an |
| | - Kekeringan | 5 | - | 1 | 1 | - | Kejadi an |
| | - Kebakaran | 81 | 64 | 90 | 140 | 88 | Kejadi an |
| | - Kebakaran Hutan | - | | - | 6 | - | Kejadi an |
| 4. | Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana | | | | | | |
| | - Erupsi | - | - | 1 | - | - | Jiwa |
| | - Gempa Bumi | - | - | - | - | - | Jiwa |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | - Banjir | - | - | - | - | - | Jiwa |
| | - Tanah Longsor | - | - | 3 | - | - | Jiwa |
| | - Angin Ribut | 1 | - | 1 | 3 | - | Jiwa |
| | - Petir | - | - | - | - | - | Jiwa |
| | - Kekeringan | - | - | - | - | - | Jiwa |
| | - Kebakaran | - | - | - | 1 | - | Jiwa |
| 5. | Jumlah Kerugian Material | 3.388.262.540 | 869.400.000 | 13.813.000.000 | 4.739.775.000 | 1.991.097.500 | |
| | - Erupsi | - | - | 13.363.000.000 | - | - | Rp |
| | - Gempa Bumi | - | - | 25.000.000 | - | - | Rp |
| | - Banjir | 153.065.940 | - | - | - | 675.325.000 | Rp |
| | - Banjir Lahar Dingin | - | - | 75.000.000 | - | 60.000.000 | Rp |
| | - Tanah Longsor | - | - | 3.800.000 | 4.734.475.000 | 786.400.000 | Rp |
| | - Angin Kencang | 3.235.196.600 | 69.400.000 | 346.200.000 | 5.300.000 | 464.872.500 | Rp |
| | - Petir | - | - | - | - | 4.500.000 | Rp |
| | - Kekeringan | - | - | - | - | - | Rp |
| 6. | Jumlah Dana Penanggulangan bencana/penyuluhan | 1.026.416.000 | 92.400.000 | 111.150.000 | 311.150.000 | 65.450.000 | Rp |
| 7. | Masyarakat tertib Pada Daerah Rawan bencana | 2540 | 3263 | 4863 | 5968 | 6690 | Orang |
| 8. | Jumlah masyarakat | 3263 | 3950 | 4370 | 5310 | 5910 | Orang |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|
| | at yang paham terhadap bencana | | | | | | |
| 9. | Desa Tangguh bencana | - | 1 | 5 | 13 | 24 | Desa |
| 10. | Sekolah Siaga Bencana | 1 | 3 | 5 | 28 | 40 | Sekolah |
| 11. | EWS yang berfungsi baik | 12 | 13 | 13 | 16 | 20 | Unit |

DATA WAWANCARA DAN PENYEBARAN QUESIONER

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN



Mewawancarai kepada:

Nama : Hendri Setiawan, S.Sos., M.P.A
Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Petanahan
Tempat : Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tanggal wawancara : Selasa, 22 November 2017

BERKAS WAWANCARA

TUGAS AKHIR



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

| | |
|-------------------|----------------------------|
| No. Wawancara : 3 | Tanggal : 22 November 2017 |
|-------------------|----------------------------|

A. KHUSUS

- 1. Apasaja bencana yang mejadi dasar penentuan kawasan rawan bencana?**

Terdapat empat bencana alam yang sering terjadi di Sleman ini mbak, seperti Erupsi Gunung Merapi, Angin Kencang, Banjir, sama Kekeringan.

- 2. Apa pedomanan dan standarisasi yang dimiliki Dinas Pertanahan dan tata ruang dalam melakukan penanggulangan bencana?**

Didasari dengan aspek dari pertanahan, dengan adanya peraturan daerah tentang RTRW. Peraturan RTRW itukan hasil dari perubahan dan penyesuaian dengan keadaan daerah Sleman. Melalui dampak erupsi merapi tahun 2010 kemarin sebagai latar belakang pembaharuan perda RTRW, yang memasukkan kawasan rawan bencana.

Memang dalam aturannya bisa melakukan review tiap lima tahun sekali, namun didasari beberapa aspek. Salah satunya alasan kawasan rawan bencana yang berubah setelah erupsi merapi 2010.

3. Kebijakan dalam peraturan zonasi kawasan lindung geologi apasajakah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan tata ruang dalam tahapan pra bencana maupun pasca?

Dinas Pertanahan dan tata Ruang ini baru berdiri pada tahun 2017, dapat dibbilang lembaga yang baru. Pada tahun 2015 bertindak sebagai Kantor Pertanahan Daerah. Sedangkan pasca erupsi merapi 2010 masih bernama Dinas Pertanahan Daerah. Maka dari itu kebijakan yang kami yang sudah dikeluarkan untuk kebencanaan masih sedikit. Dalam tahap pasca bencana DISPENTARU sebagai yang bertanggungjawab pelaksanaan pengadaan tanah untuk HUNTAP 2012-2013. Saat pengadaan HUNTAP 2012-2013 DISPENTARU mendapat bantuan dana dari program BKK (Bantuan Khusus Keuangan) dari BPBD ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk kewenangan administrasi di serahkan kepada BPN Sleman.

4. Kewenangan apasaja yang dimiliki DISPENTARU?

Kewenangan yang dimiliki tata ruang, tentang pemetaan tata ruang Pengkajian dan penyiapan data yang berkaitan dengan tata ruang.

5. Bagaimana jika terjadi pendirian hunian melanggar tata ruang ?

Sanksi pengawasan, lebih focus dalam pembinaan dari tata ruang. Seksi badan pertanahan, kegiatan pengawasan tanah desa dan pengaswan

tanah SG, pengawasan tanah bukan tanah sg bukan tanah desa, pengasawan ruang. Sanksi blm melakukan, terus terang belum ada aturan yang mengatur mengenai sanksi dalam perda maupun pergub. Dulu memberikan peringatan-peringatan tertulis dan yang menendak SATPOLPP. Sekarang belum ada, masih dalam kajian. Masalahnya banyak lembaga daerah yang memiliki kewenangan pengawasan masing-masing.

Pengawasan tanah dan bangunan : BPN

Pengawasan Lingkungan : BLH

Contohnya kasus woth cestel, semuanya mengeluarkan pringatan. The ring (MDR) masyarakat yang berpenghasilan rendah, sendiri sendiri mengajukan sanksi. Akan dirancang satu lembaga saja yang akan memberikan sanksi, agar lebih efisien.

B. UMUM

- 1. Apakah semua sektor hukum yang terkait, sudah mencakup dalam mendukung pengeluaran kebijakan peningkatan keselamatan dan pengurangan bencana?**

Bagi Rencana Tata Ruang sendiri termasuk cukup guna penanggulangan bencana di sektor Pemetaan Pertanahan.

- 2. Apakah hukum yang ada menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan sudah mengatur anggaran untuk program pengurangan resiko bencana?**

Kalau penganggaran secara khusus tentang penanggulangan bencana, khususnya seperti anggaran bagi pembuatan zona bencana tidak ada. Namun anggaran secara umum bagi tata ruang secara keseluruhan ada.

3. Apakah hukum yang ada sudah mengatur penyelenggaraan sistem peringatan dini bagi Dinas Pertanahan dan tata ruang? (Seperti jalur evakuasi dll)

Pemetaan, lebih mengerti dan mengatur hal tersebut adalah BPBD dan Dinas perhubungan.

4. Apakah sistem tanggungjawab dan prosedur telah mempertimbangkan terwujudnya tujuan pengurangan resiko bencana?

Karena kabupaten sleman termasuk kawasan tinggi bencana, maka dalam hal pemetaan tata ruang DISPENTARU menyediakan data dan pengkjian yang berkaitan dengan tata ruang bagi penanggulangan bencana.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SLEMAN**



Mewawancarai kepada:

Nama : Djokolelana Julianto, S.T

Jabatan : Kepala Seksi Mitigasi Bencana

Tempat : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tanggal wawancara : Jumat, 17 November 2017



BERKAS WAWANCARA
TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN

No. Wawancara : 1

Tanggal : 17 November 2017

A. KHUSUS

1. Apa pedomanan dan standarisasi yang dimiliki BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana?

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau kegiatan wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup.

Dan Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan.

2. Bagaimana prosedur penanganan bencana?

Prosedur Penanganan Bencana dilihat dari jangka waktunya dan pembagian kewenangan dalam tiap bidang, yaitu

1) Pra Bencana

Bidang Pencegahan dan kesiapan

Memiliki program (mitigasi) bencana (structural non struktural), lebih difokuskan ke peran masyarakat.

2) Saat Bencana

Status tanggap darurat, dalam kewenangan BPBD sendiri langsung dalam jika waktu 7 sampai 14 hari bisa diperpanjang tergantung kondisi, yang berperan adalah bidang kedaruratan dan logistic.

3) Post Bencana

Masuk dalam tahap Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Rehabilitasi, begitu terjadi bencana peran pemerintah pertama melakukan rehabilitasi. Bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi dari masing masing sarana dan prasarana desa, yang bersifat sementara.

Rekontruksi, membangun kembali daerah yang terdampak bencana yang bersifat tetap, seperti hunian tetap.

3. Bagaimana struktural keanggotaan BPBD Kabupaten Selman?

Struktur keanggotaan BPBD

1. Terdapat 3 bidang

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapan, terdiri dari dua seksi:
 - 1) Seksi mitigasi bencana
 - 2) Seksi kesiapsiagaan
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari dua seksi:
 - 1) Seksi Kedaruratan
 - 2) Seksi Logistik
- c. Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi, terdiri dari dua seksi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi
 - 2) Seksi Rekontruksi.

2. 1 sekretariat,

3. Pernah ada PT pemadam namun sekarang sudah diambil alih oleh SATPOLPP (Satuan Polisi Pamong Praja).

4. Kebijakan apasajakah yang dikeluarkan oleh tiap bidang-bidang dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana? (Program kerja apa saja yang telah terlaksana)

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapansiagaan terdapat satu program pencegahan dini dan penanggulangan program bencana alam, memiliki tujuh kegitaannya.

2016, tujuh kegiatan

2015, delapan kegiatan

2014, enam kegiatan

2012-2013, empat kegiatan

contoh dalam bidang mitigasi, pencegahan dan pengurangan risiko bencana

2. Pengelolaan sarana prasarana mitigasi
3. Pengelolaan early warning system
4. Program kegiatan data dan informasi, penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

5. Apasaja kebijakan yang dikeluarkan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sleman?

Kabupaten Sleman belum memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana yang terdiri dari beberapa instansi. Namun Forum pengurangan risiko bencana, FK2RS (forum komunikasi komunitas relawan sleman) mewadai relawan-relawan dan komunitas di kabupaten sleman. Jika komunitasnya sudah terdaftar 49, dan relawannya 1600an.

Forum pengurangan resiko bencana (terdiri dari pemerintah, dunia usaha,, personal, komunitas) dengan tujuan sadar bencana hingga terwujudnya perilaku pengurangan bencana.

6. Kebijakan mitigasi udah berapa kali dilakukan oleh BPBD ?

Mitigasi bencana yang berbasis masyarakat, pelatihan-pelatihan pencegahan bencana, pemetaan kapasitas, pemetaan kerentanan yang disajikan dalam peta risiko bencana, setelah mengetahui baru menanamkan budaya sadar bencana, masuk perilaku masyarakat dalam bentuk pengurangan risiko. Dengan memancing masyarakat untuk

membuat perencanaan-perencanaan pencegahan bencana dimasing-masing wilayah. Baru nanti BPBD memberikan dukungan dalam hal biaya (material) melalui pengajuan proposal, dan menjalankan kembali kemasyarakatan (gotong-royong).

B. UMUM

1. Apakah semua sektor hukum yang terkait, sudah mencakup dalam mendukung pengeluaran kebijakan peningkatan keselamatan dan pengurangan bencana?

Peraturan bupati tentang kawasan rawan bencana, kita membuat satu ketentuan III, kita punya kebijakan tidak dibolehkan ada kemungkinan. Yang awalnya sudah ada namun karena ada peraturan melarang ada permukiman maka harus ada relokasi hunian. Dengan melihat aspek dan faktor masyarakat dengan mata pencarian tetap. Maka sulit untuk merelokasi. Lebih baik tidak memberikan perizinan di kawasan rawan bencana III atau kata lain pertumbuhannya nol persen.

Sudah melakukan pemberian listrik, tidak membangun jalan. Namun mereka bisa membangun sendiri.

Dengan ada sediaan relokasi, memindahkan kehidupan manusia

2. Apakah hukum yang ada menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan sudah mengatur anggaran untuk program pengurangan resiko bencana?

Dalam pembahasan mengenai anggaran memiliki kendala tentang kewenangan antara BPBD dengan PU, tidak ada aturan yang mengatur

bahwa jalan a b sebagai jalan evakuasi bencana dan yang bertanggungjawab membuat BPBD. Karena jalan itu kewenangannya untuk membangun adalah PU. Lantas penganggarannya dalam melakukan program kerja masih belum ada kepastian. PU dalam program perbaikan dan perawatan jalan, diwilayah jalan provinsi, kabupaten, nasional, desa.

BPBD masuknya sebatas permintaan warga untuk jalur evakuasi.

3. Apakah hukum yang ada sudah mengatur penyelenggaraan sistem peringatan dini bagi BPBD?

Aturan mainnya blm past, namun hingga saat ini kita memakai PERKA BNPB tentang pringatan dini berbasis masyarakat. Belum adanya aturan pelaksana di lingkup kabupaten, walaupun ada di PERDA namun hanya dalam penanggulangan bencana memerlukan pringatandini untuk mengurangi dampak peringatan dini. Juklas juklis.

4. Apakah sistem tanggungjawab dan prosedur telah mempertimbangkan terwujudnya tujuan pengurangan resiko bencana?

BPBD berkoordinator atau penanggungjawab sebagai komando (eksakuisio sekda) dapat memerintahkan ke dinas-dinas. Pelaksana harian BPBD, menyiapkan kebijakan, data kebencanaan, teknis pelaksanaan kejadian. Maka pelaksana dibagi oleh bidang-bidang tersebut.

5. Apakah hukum yang ada sudah meliputi pertimbangan dan memberikan kedudukan khusus bagi para wanita dan atau anggota masyarakat penyandang disabilitas?

Wanita dan disabilitas

Untuk mengutamakan dan mendahulukan kelompok rentan

1. Penyandang disabilitas
2. Ibu hamil
3. Ibu menyusui
4. Lansia
5. Anak-anak

SOP menyiapkan rencana teknis dengan mengutamakan kelompok rentan. Dilihat dari status bencana yang terdiri dari, Normal aktif, Waspada, Siaga (langsung mengungsiakn kelompok rentan), Awas (maka harus dikosongkan) baru semua difokuskan.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

SLEMAN



Mewawancarai kepada:

Nama : Nurul Kartika Andayani, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Pertanahan

Tempat : Kantor Badan Pertanahan Nasional

Tanggal wawancara : Jumat, 20 November 2017



BERKAS WAWANCARA

TUGAS AKHIR

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH

DI KABUPATEN SLEMAN

| | |
|-------------------|----------------------------|
| No. Wawancara : 1 | Tanggal : 20 November 2017 |
|-------------------|----------------------------|

A. KHUSUS

- 1. Dari Tahun 2010 Sampai dengan 2017 sudah berapa perizinan yang diterbitkan oleh BPN di area terdampak letusan gunung berapi? Perizinan dalam urusan apa ? (hunian tetap, apartemen, hotel, bangunan wisata).**

Zona KRB III ditambah KSN (Kawasan Strategis Nasional).

KRB III sama sekali tidak ada pemberian izin, namun tidak menutup kemungkinan ada kegiatan disana. Sudah dipastikan kegiatan yang di KRB III itu tidak berizin atau kata lain illegal. Karena diatuan sudah mengatur tidak dibolehkan ada kegiatan apapun, hunianpun juga tidak dibolehkan.

Namun dengan hunian yang sejak awal sudah ada hunian sebelum tahun 2010 itu, tidak mudah untuk merelokasi suatu desa yang sudah memiliki mata pencarian dipindah ke suatu tempat yang baru. Merubah kebiasaan

itu susah, yang awalnya memiliki tanah besar dapat untuk bercocok tanam diganti dengan tanah hanya sepetak.

Ada konsolidasi tanah pada tahun 2013, setelah erupsi 2010 mereka diberikan hunian tetap dibawah. Huntap terdapat 8 Huntap, sertifikat dari tanah hingga bangunan diberikan. Bertujuan agar mereka turun ke huntap tersebut.

Factor wisata yang semakin meningkat membuat masyarakat kembali lagi ke rumah awalnya, karena melihat potensi yang lebih besar.

Semua izin yang diturunkan harus berpatokan dengan RTRW, RTRW Daerah harus disinkronkan antara RTRW provinsi dan pemerintah.

Tak lepas dari tata ruang, dilihat juga dengan aspek lingkungan, persawahan.

Sawah tersebut memiliki keunggulan dari tanahnya bagus, irigasinya bagus, hasil panen memuaskan, pasti tidak dibolehkan untuk dikeringkan. Walaupun dalam RTRW dibolehkan.

Dalam tata guna tanah, tidak dibolehkan pada sawah yang irigasinya teknis yang sudah di bangun oleh pemerintah menjadi mubazir.

Relokasi

Huntap mandiri (tanah miliki warga, namun bangunan dibangun oleh pemerintah)

Huntap pemerintah (dari tanah hingga bangunan hasil subsidi pemerintah).

2. Bagaimana mekanisme penerbitan izin?

Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam pengeluaran izin itu didasari dengan Peraturan bupati tentang RTRW, dan tidak lepas dari faktor lingkungan.

3. Apakah izin semua ini sudah memenuhi unsur-unsur penanggulangan bencana?

Untuk saat ini saya pastikan bahwa BPN tidak akan memberikan izin pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana.

Namun untuk kawasan yang sudah berdiri bangunan sejak lama sebelum aturan RTRW tahun 2012 itu keluar, maka masih di diberi izin.

4. Lalu bagaimana BPN sendiri untuk melakukan analisis penanggulangan bencananya?

Tidak secara langsung menangani penanggulangan bencana, sebatas mengikuti prosedur-prosedur tata guna tanah sesuai aturan yang ada BPN ada Peraturan kepala badan no 2 Tahun 2011 mengenai pedoman teknis pertanahan, untuk perubahan penggunaan tanah dan izin lokasi. Semua perubahan penggunaan tanah misal dari sawah kepekarangan atau dari pekarangan ke lainnya (Penggunaan satu ke penggunaan lainnya) misalkan dari bengkel ke hotel, dari apartemen ke mall harus didasari dengan pedoman tersebut.

Dasar hukum pertimbangan untuk dikabulkan atau tidak adalah didasari dengan tata ruang (RTRW), di Indonesia memiliki beberapa RTRW:

- a. RTRW Nasional
- b. RTRW Wilayah Provinsi
- c. RTRW Daerah Kabupaten

Setelah adanya perda yang mengatur RTRW maka harus ada RDTRK dalam lingkup daerah (namun hingga sekarang belum dikeluarkan PERDA oleh kabupaten sleman ini) yang melakukan baru kajian-kajian perkecamatan.

5. Jika terjadi bencana, apakah pemerintah khususnya BPN memiliki peran untuk bertanggungjawab?

Iyaa, namun secara bersama-sama dnegan instansi lainnya dalam melakukan relokasi.

6. Apakah BPN berperan aktif dalam kebijakan mitigasi?

Kami memiliki tanggungjawab dalam hal penanganan relokasi ke hunian tetap mandiri (tanah yang dimiliki sendiri oleh warga) dan hunian tetap pemerintah (tanah bersumber dari bantuan pemerintah).

B. UMUM

1. Apakah semua sektor hukum yang terkait, sudah mencakup dalam mendukung pengeluaran kebijakan peningkatan keselamatan dan pengurangan bencana?

Sleman, pembentukan awal sebelum adanya erupsi sudah ada RTRW. Namun setelah ada erupsi ditarik kembali untuk dimasukkan zona zona rawan bencana. Termasuk tempat tempat evakuasi, sudaah.

2. Apakah hukum yang ada menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan sudah mengatur anggaran untuk program pengurangan resiko bencana?

Sudah, di cangkringan ada tersendiri penataan pasca erupsi. TATA ruang Provinsi ada khussu cangkringan.

3. Apakah hukum yang ada sudah mengatur pentingnya pendidikan, training, dan kesadaran untuk mendorong sistem pengurangan resiko bencana?

BPN dan Dipertaru melakukan pelatihan-pelatihan Tata ruang wajib di sosialisasikan, karena masyarakat wajib tau mana zona yang dapat dibangun atau tidak. Dinas perizinan, dispertaru, dan bpn

4. Apakah hukum di daerah ini sudah mengatur jelas peran dan tanggungjawab terkait pengurangan bencana yang melibatkan semua institusi pemerintah?

Pemda sudah mengatur tentang pembagian instansi:

BPBD

Dispertaru

LSM

Dinas Pertanian (penghijauan)

Dinas peternakan (pemberian hewan)

5. Apakah sistem tanggungjawab dan prosedur telah mempertimbangkan terwujudnya tujuan pengurangan resiko bencana?

Sudah, bahwa KRB zona III, II, ICangkringan jarang, pembangunan kurang karena zonanya memang bukan untuk arah pembangunan, Wisata, Taman kaliurang, Museum ulen sentalu.

Kalua ditata gunaan tanah kalua yang sudah terlanjut itu tidak boleh berkembang.

Dikota SGM, memang dipinggiran maka sekarang tetap pasif karena sudah masuk dalam kota.



BERKAS WAWANCARA

TUGAS AKHIR DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA WUKIRSARI

| | |
|--------------------|----------------------------|
| No. Wawancara : 04 | Tanggal : 27 Februari 2017 |
|--------------------|----------------------------|



- 1. Apakah Bapak mengetahui risiko bencana apa saja yang dapat terjadi di daerah ini?**

Untuk saat ini bencana Erupsi Gunung Merapi, Banjir dan Angin Kencang yang menjadi ancaman bencana.

- 2. Rencana Bapak untuk mengurangi risiko bencana bagaimana ?**

- a. Dalam sektor pertanian, mendirikan perkumpulan Gabungan Kelompok Tani Wukirsari. Serta memberi arahan iklim tanaman, seperti tanahaman tahunan yaitu kopi dan coklat yang kuat atas bencana.
- b. Dalam sektor Perhotelan, dengan memberi arahan sesuai perda no 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung, mengarahkan mendirikan bangunan menjauhi kawasan rawan bencana, menganjurkan pengasransian bangunan, dan mengarahkan untuk menyiapkan fasilitas dan ikut pelatihan peringatan dini.
- c. Dalam sektor Penambang Pasir, untuk penambang pasir diwukirsari yang diluar kawasan khas desa, semuanya ilegal tanpa izin. Pemerintah desa tidak bisa menindak lanjuti karena merunut saya yang berhak bukanlah kami namun dari pemerintah daerah.

3. Kebijakan yang sudah dilakukan kelurahan dalam penanggulangan bencana bagaimana?

Karena korban erupsi merapi yang menghilangkan 3 padukuhan (gondang, pusong, dan ngepringan yang total 2000 jiwa. Maka kebijakannya melakukan relokasi kurang lebih 200KK.

Karena wukirsari sebagai desa tangguh bencana maka setelah erupsi merapi pemerintah desa melakukan sekenario bencana, untuk berlangsungnya peringatan dini.



TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA
GUNA TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN

VILA PADI

| | |
|--------------------|----------------------------|
| No. Wawancara : 05 | Tanggal : 27 Februari 2017 |
|--------------------|----------------------------|



- 1. Apakah Ibu mengetahui risiko bencana yang dapat terjadi di daerah ini?**

Setahu saya yang pasti erupsi merapi dan angin kencang.

- 2. Rencana Ibu dalam mengurangi risiko bencana apa saja?**

Kami mendirikan bangunan yang jauh dari lereng merapi, memasang jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana.

- 3. Apa saja rencana yang sudah dilakukan guna penanggulangan bencana di villa ini?**

Untuk saat ini pihak kantor melakukan penyimpanan surat-surat berharga di kantor pusat yang notabennya jauh dari kawasan rawan bencana. Untuk selebihnya belum.



**TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA
GUNA TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN**

**PENAMBANG PASIR
BAPAK NGATIAR**

No. Wawancara : 06

Tanggal : 27 Februari 2017



1. Berapa banyak pasir yang di tambang setiap tahunnya?

Kira-kira dalam satu hari saya dapat mengeruk 6-8 meter kubik perhari.
(maka dalam setahun kira-kira 2.890 meter kubik).

2. Apakah Bapak mengetahui risiko bencana yang akan terjadi dalam pertambangan?

Yang pasti saat hujan deras banjir mbak.

3. Rencana Bapak dalam mengurangi risiko bencana?

Mengasuransikana alat berat biar ga rugi-rugi banget mbak jika terjadi yang tidak diinginkan.

4. Bapak tahu jika hasil tambang melebihi 500 meter perkupik dalam setahunnya harus mendapatkan izin AMDAL?

Aduh mbak saya kurang tahu tentang hal seperti itu

5. Rencana Bapak sekarang untuk menjadi penanggulangan bencana untuk diri bapak saat menambang bagaimana?

Sederhana mbak, jika hujan deras saya dan temen-temen say menepi ke daratan yang ke daratan yang lebih tinggi (hujan naik). Peralatan seperti sepatu topi dan baju panjang yang sehari-hari saya gunakan.



**TUGAS AKHIR
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA
GUNA TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN**

**PETANI
Bapak Sugeng**

No. Wawancara : 07

Tanggal : 27 Februari 2017



- 1. Apakah Bapak mengetahui risiko bencana yang dapat mengancam hasil pertanian?**

Yang pasti gunung merapi dan banjir jika hujan deras mbak.

- 2. Rencana Bapak dalam pencegahan risiko bencana?**

Mengikuti pelatihan untuk mempelajari iklim yang cocok untuk menanam tanaman jenis apa. Mendapatkan paptisida organik yang bermutu untuk tanaman padi saat musim hujan, karena saat ini kami masih sering

menggunakan paptisida kimia yang banyak pada padi. Jika tidak diberi paptisida kimia tanaman akan cepat busuk.

3. Risiko kerugian terbesar yang dialami oleh petani apa?

Dari hama mbak, hama tikus di daerah sini sudah tidak dapat di cegah, walaupun pemerintah desa sudah melepas burung alba namun hasilnya masih sedikit.

4. Rencana apa saja yang telah dilakukan oleh bapak dalam mengurangi risiko bencana?

Sudah ada kelompok tani unggul yang berguna membagi masukan dan infomasi.

Terdapat satu lumbung penyimpanan padi di desa tanjung wukirsari, dan mengganti tanaman dengan mengira-ngira sesuai musim, contohnya:

Jika musim kemarau kita bisa menanam apa saja, sedangkan jika musim hujan namannya pala wijo satu kali dalam satu musim dengan ekstra pengobatan. Dan menanam padi tiga kali dalam satu musim dengan ekstra paptisidan dan insetisida.

BERKAS QUESTIONER



**TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN
RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN
TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
ANGKET**

| | |
|---------------|-----------|
| No. Angket : | Tanggal : |
| Desa/ Dusun : | |

A. Data Pribadi :

Nama :

Jenis Kelamin :

TTL :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Apasaja bencana alam yang sering terjadi di daerah ini?*

- Gunung Berapi (Awan panas, Lahar Dingin, Gunung Meletus)
- Gempa Bumi
- Angin Kencang
- Banjir
- Tanah Longsor
- Kekeringan
- Kebakaran Hutan
- Lainnya

2. Bagaimana anda mengetahui prosedur dan macam-macam penanggulangan risiko bencana?*

- Brosur Bencana
- Penyuluhan dan Pelatihan Penanggulangan Risiko Bencana
- Internet
- Lainnya

3. Bagaimana dampak masyarakat saat mengalami bencana alam di Kabupaten Sleman?

Kemungkinan :

.....
.....
.....

Kerugian :

.....
.....
.....

4. Apakah daerah ini pernah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah Kabupaten Sleman?*

- SUDAH
- BELUM

5. Jika sudah mengikuti pelatihan, pelatihan apa yang diselenggarakan?*

- Penyuluhan peringatan dini
- Pendidikan, training untuk kesadaran penanggulangan bencana

Penyuluhan penanganan peringatan dini kepada warga penyandang disabilitas

Lainnya.....

6. Apasaja kebijakan masyarakat dalam pengurangan bencana di daerah ini ?

.....
.....
.....
.....
.....

7. Bagaimana perencanaan penanggulangan resiko bencana yang keluarga anda lakukan?*

Mengansuransi Rumah

Menyimpan Surat-surat Berharga Dilembaga Penyimpan

Mendirikan Hunian Rumah Diluar Zona Bencana

Lainnya

8. Apasaja kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengurangan bencana di daerah ini ?

.....
.....
.....
.....

9. Bagaimana dampak yang saudara rasakan setelah mendapat kebijakan Kabupaten Sleman?

.....
.....
.....
.....

10. Jika daerah tempat tinggal Anda sebagai wilayah tinggi bencana, apakah anda bersedia di alokasikan ke wilayah rendah bencana?*

YA

TIDAK

11. Jika anda menjawab tidak, maka saran apa yang akan anda berikan dalam penanggulangan bencana?

.....
.....
.....

NB : *coret yang anda rasa benar

DATA HASIL PENYEBARAN QUESIONER

| NO. | KATAGORI | PEMBAGIAN | JUMLAH ANGKET |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | Bencana | Gunung Merapi | 25 |
| | | Gempa Bumi | 18 |
| | | Angin Kencang | 21 |
| | | Tanah Longsor | 6 |
| | | Banjir | 9 |
| | | Kekeringan | 1 |
| 2. | Sumber Informasi Kebencanaan Dan Penanganannya | Brusur Atau Slebarann | 9 |
| | | Penyuluhan Dan Pelatihan | 13 |
| | | Internet | 1 |
| 3. | Dampak Kerugian Karena Bencana | Rumah Tidak Terlihat Lagi | 9 |
| | | Rumah Rusak | 13 |
| | | Hewan Ternak Hilang (Sapi) | 2 |
| | | Hewan Ternak Hilang (Kambing) | 2 |
| 4. | Penyuluhan | Pelatihan Peringatan Dini | 22 |
| | | Pendidikan Training Kesadaran Penanggulangan Bencana | 23 |
| | | Penyuluhan Kepada Warga Penyandang Disabilitas | 11 |
| 5. | Kebijakan Masyarakat | Gotong Royong Pembersihan Abu Vulkanik | 9 |
| | | Mengeruk Pasir Kali Kuning Secara Manual | 4 |
| | | Bebenah Jalan Yang Rusak | 2 |
| | | Membuat Jembatan Darurat | 3 |
| | | Pemulihan Mental Dan Religius | 4 |
| | | Sosialisasi Mandiri Antar Warga | 11 |
| | | Pelatihan Pos Kmapling Siaga Bencana | 2 |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|----|
| | | Sumur Bor | 4 |
| | | Swadaya Dapur Umum | 1 |
| | | Membuat Plang Evakuasi | 4 |
| | | Pembuatan Plang Titik Kumpul | 3 |
| 6. | Penanggulangan Bencana Keluarga | Angsuransi Rumah | 2 |
| | | Menyimpan Surat-Surat Berharga Dilembaga Penyimpanan | 5 |
| | | Mendirikan Hunian Rumah Diluar Zona Bencana | 4 |
| | | Titip Saudara | 5 |
| 7. | Kebijakan Pemerintah | Pendirian Hutap | 23 |
| | | Pembuatan Talut | 1 |
| | | Pembuatan Lapangan | 6 |
| | | Penyediaan Alat Dapur | 7 |
| | | Penyediaan Gedung Pertemuan | 4 |
| | | Penyediaan Fasilitas Masjid | 4 |
| | | Normaliasi Kali Gendol, Opak | 6 |
| | | Penyediaan Barak | 4 |
| | | Bantuan Sembako | 14 |
| | | Fasilitas Kartu Sehat | 3 |
| | | Fasilitas Kartu Bebas Biaya Sekolah | 3 |
| | | Pelayanan Biro Kراسي Yang Dimudahkan | 2 |
| 8. | Kesediaan Relokasi | Bersedia | 17 |
| | | Tidak Bersedia | 5 |

DOKUMENTASI PENELITIAN



HUNTAP DONGKELSARI



**JALUR EVAKUASI DAN TITIK
KUMPUL
HUNTAP DONGKELSARI**



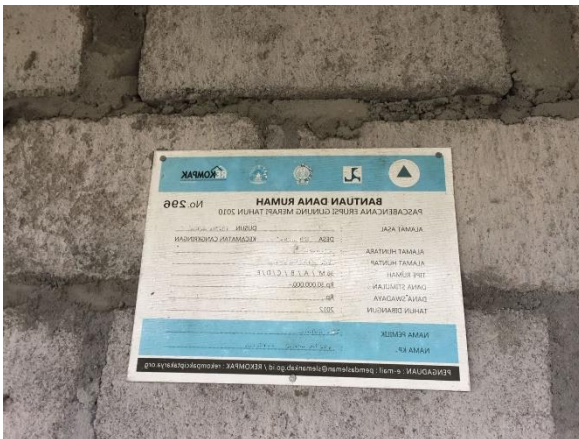
HUNTAP PAGERJURANG



FASILITAS UMUM

LAPANGAN HUNTAH

PAGERJURANG



BUKTI BANTUAN

RP 30.000.000, 00 PER RUMAH



FASILITAS UMUM HUTAH

PAGERJURANG

GEDUNG PERTEMUAN



HUNTAP PLOSO KEREK



BENTUK HUNTAP



FASILITAS UMUM

BARAK PENGUNGSIAN

PLOSO KEREK



BARAK PEGUNGSIAN

WUKIRSARI



KEBIAJKAN PELEPASAN

BURUNG ALBA

DOKUMENTASI SAAT PENYEBARAN QUESIONER







PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/cc/XII.2014)

Nomor: 06/Turnitin/LabHKM/III/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Berti Nova Khafifa Bazar

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20140610122

Judul : Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Melalui
Perencanaan Tata Guna Tanah Di Kabupaten Sleman

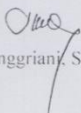
Dosen Pembimbing : Sunarno, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 8%, dengan Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.


Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum


Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum


Nur Hasyim Latif, SIP

Skripsi_BERTI NOVA KHAFIFA
BAZAR_20140610122_PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN
TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

Internet Source

2%



bpbd.slemankab.go.id
Internet Source

2%



digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

2%



www.docstoc.com
Internet Source

1%



Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper

1%



dokumen.tips
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off